



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BNN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023



BNN KOTA PEKANBARU

Email : bnnkota_pekanbaru@bnn.go.id

Website : www.pekanbarukota@bnn.go.id

Telp : (0761) 849110

KATA PENGANTAR

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru merupakan Instansi Vertikal dari Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BNN.

Restra BNN tersebut memberikan arah dan focus bagi pelaksanaan Program dan kegiatan BNN di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi dasar terciptanya good governance and clean governance.

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BNN Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah kota Pekanbaru tahun 2023, dan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, transparan dan bertanggung jawab kepada public yang di ukur secara kualitatif dan kuantitatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomo 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja yang berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Secara umum Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru telah berupaya keras untuk melakukan pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan yang bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba khususnya di wilayah kota Pekanbaru.

Diharapkan melalui laporan ini dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sekaligus menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang, serta dapat menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN kota Pekanbaru secara keseluruhan.

Pekanbaru, 5 Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Pekanbaru**



Berliando, S.I.K.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi ...	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	13
C. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Analisis Capaian Sasaran	18
B. Akuntabilitas Keuangan	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
LAMPIRAN	
Dokumen Pengukuran Kinerja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2023 disusun sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja yang diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis dan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja. Penetapan Kinerja tahun 2023 BNN Kota Pekanbaru mengacu pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) BNN yaitu meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan terwujudnya manajemen organisasi yang professional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Capaian Sasaran Kegiatan BNN Kota Pekanbaru pada tahun 2023, sebagai berikut :

1. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba target 52 Indeks tercapai 53,53 atau 102,9%, kategori “Sangat Tinggi”.
2. Indeks Ketahanan keluarga terhadap faktor resiko penyalahgunaan narkoba, target 78 Indeks tercapai 85,625 persentase 109,7% dengan kategori “Tinggi”.
3. Indeks Kemandirian Partisipasi, target 3,4 Indeks, tercapai 3,85 atau 103,2%.
4. Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mangalami peningkatan kualitas hidup, target 80,81, tercapai 73,1 dengan persentase 90,4%.
5. Jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, target 5 Orang, tercapai 5 Orang, persentase 100%.
6. Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional, target 5 Lembaga, tercapai 5 lembaga, persentase 100%.
7. Jumlah Unit penyelenggara layanan IBM yang operasional, target 2 unit, tercapai 2 Unit, persetase 100%.
8. Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba, target 3,2 Indeks, tercapai 3,64 Indeks, persentase 113,7%.
9. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21, target 3 Berkas Perkara, tercapai 7 Berkas perkara, persetase 233,3%.
10. Nilai Kinerja Anggaran, target 89 Indeks, tercapai 86,23, persentase 97,98%.

11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), target 92 Indeks, tercapai 98,13, persentase 106,6%.

Dari segi anggaran pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru memperoleh pagu alokasi anggaran awal sebesar Rp. 1.998.391.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang kemudian seiring adanya kebijakan penambahan anggaran untuk layanan arsiparis dan penambahan PNBPN hingga pada akhir tahun anggaran secara total menjadi Rp. 2.048.551.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.038.617.000,- (*Dua Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*) atau 99,52% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.933.900,- atau 0,48%.

Capaian target kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2023, telah menggambarkan semakin berfungsinya peran dari berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan program P4GN kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa kinerja BNN kota Pekanbaru setiap tahunnya sudah menunjukkan hasil kinerja yang baik, namun dibalik hal tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Serta melaksanakan sinergitas dengan seluruh elemen/komponen di kota Pekanbaru untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Pekanbaru.

BNN Kota Pekanbaru melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan mengusung Tema Nasional “**Kerja Cepat, Kerja Hebat, Berantas Narkoba di Indonesia**” di iringi tag line “**Speed Up, Never Let Up, War On Drugs**” , hal ini sebagai bentuk sinergitas dengan menitik-beratkan pada implementasi rencana aksi Kementerian lembaga dan pemerintah daerah telah dikeluarkan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor P4GN tahun 2020-2024. Langkah strategis yang dilakukan BNN RI dan juga telah dilaksanakan oleh BNN Kota Pekanbaru dalam upaya perang melawan narkoba, yaitu melalui strategi **Soft Power Approach** yaitu tindakan preventif untuk membentuk ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba, **Hard Power Approach** ialah tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba, **Smart Power Approach** yaitu melakukan penanggulangan permasalahan narkoba dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan memaksimalkannya di era digital ini dalam segala aspek P4GN dan Cooperation merupakan bentuk kerjasama dan bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan Pekanbaru Bersinar.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang

meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Adapun tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran selama Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan media transparansi serta pertanggungjawaban BNN Kota Pekanbaru kepada masyarakat dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BNN Kota Pekanbaru.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Pekanbaru TA. 2023 Nomor : SP-DIPA-066.01.2.689529/2023 tanggal 30 November 2022;

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kota Pekanbaru.

BNN Kota Pekanbaru mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- g. Melakukan kerja sama dengan Instansi terkait guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut, BNN Kota Pekanbaru juga bertugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Kota Pekanbaru berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Pelaksanaan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi.
- f. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN Kota Pekanbaru.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- i. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- j. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- k. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
- l. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- m. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
- n. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- o. Pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- q. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

2. Struktur Organisasi

Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, BNN Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala BNN Kota Pekanbaru
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Jabatan Fungsional BNN Kota Pekanbaru :
 - a. Konselor Adiksi Ahli Muda
 - b. Penyuluh Narkoba Ahli Muda
 - c. Dokter Muda
 - d. Pranata Keuangan APBN Mahir
4. Jabatan Pelaksana BNN Kota Pekanbaru :
 - a. Konselor
 - b. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
 - c. Pengelola Keuangan
 - d. Pengelola Barang Milik Negara
 - e. Penyidik
 - f. Analis Intelijen
 - g. Pengelola Data Sub Bagian Umum
 - h. Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum
 - i. Analis Penyuluhan dan layanan Informasi



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja

Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BNN 2020-2024 dirancang dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan menjadi pedoman bagi penyusunan program kerja tahunan Lembaga yaitu Rencana Kerja (Renja) BNN dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BNN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratis, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistic, integrative, tematik dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar sebagai gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

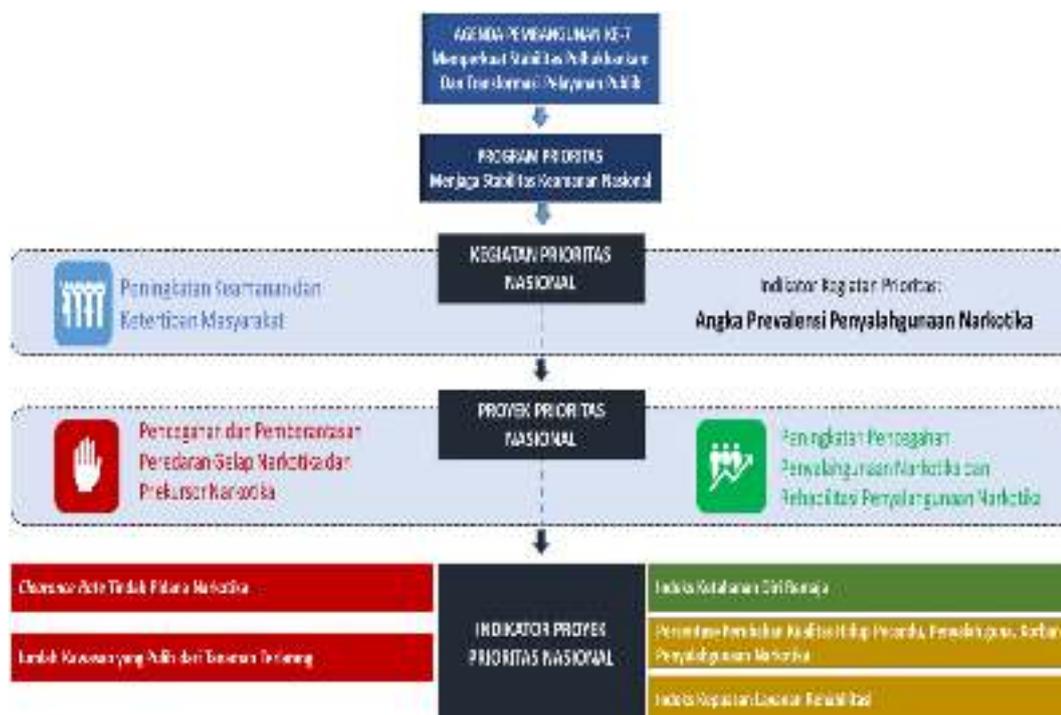
Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang maupun jangka menengah. Pada RPJMN 2020-2024 tahap ke 4 dari RPJPN 2005-2025, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. BNN sebagai institusi yang mengemban amanah dalam menanggulangi permasalahan narkoba merupakan bagian dari agenda pembangunan ke tujuh, yakni “memperkuat stabilitas bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik”.



Gambar 1. Tema Pembangunan dan 7 Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Setiap Agenda Pembangunan memiliki Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional. Jika mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka BNN merupakan salah satu elemen dalam agenda pembangunan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dengan jbaran Program Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek Prioritas Nasional sebagai berikut



Gambar 2. Posisi BNN dalam agenda Pembangunan ke-7 Nasional Tahun 2020-2024

Sumber :RPJMN 2020 - 2024

Titik hubung skema sasaran, arah kebijakan dan strategi dalam agenda pembangunan ketujuh dengan kedudukan BNN terletak pada kegiatan prioritas peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara kontekstual diharapkan dapat dicapai melalui upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari 1.86 (2020) menjadi 1.69 (2024). Dalam kegiatan prioritas tersebut terdapat proyek prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba
2. Peningkatan Pencegahan Penyalahguna Narkoba dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

Berpedoman pada Renstra Tahun 2020-2024 Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Pekanbaru memiliki visi dan misi sebagai berikut :
Visi ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru yang terlindungi dan terselamatkan dari Kejahatan Narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***, sedangkan Misi Badan Narkoba Nasional Kota Pekanbaru yang merupakan penjabaran dari misi Presiden Republik Indonesia yang terbagi ke dalam 3 rumusan sebagai berikut :

- a. Membarantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba secara Profesional;
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkoba;
- c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

Kemudian dijabarkan menjadi Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut :



Sasaran Strategis BNN 2020-2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

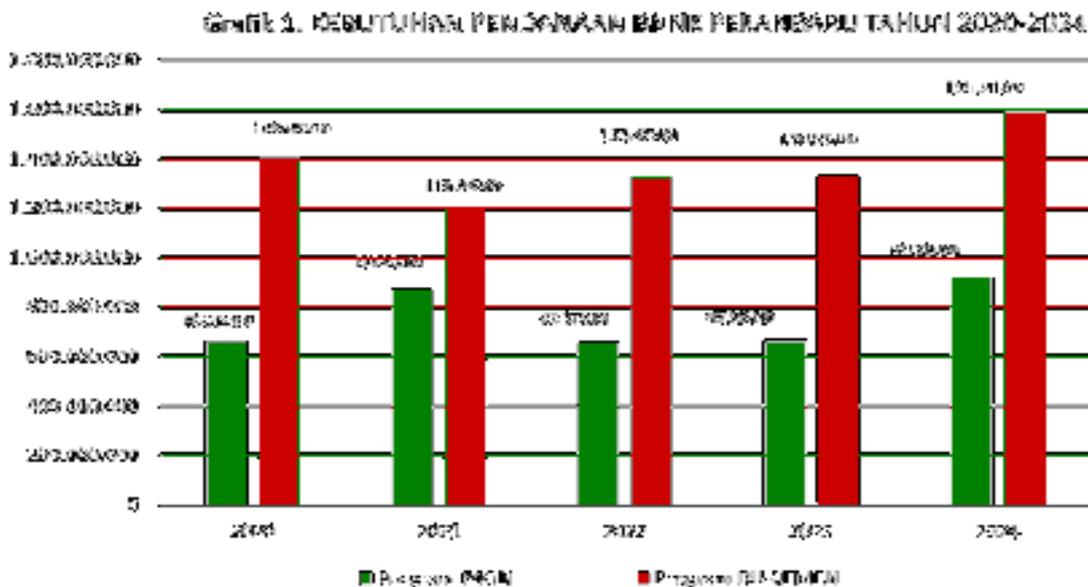
1. *Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba* Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks P4GN yang ditargetkan mengalami peningkatan 2% setiap tahunnya hingga Tahun 2024.
2. *Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi* Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks reformasi birokrasi dengan target pada Tahun 2020 sebesar 76, Tahun 2021 sebesar 77, Tahun 2022 sebesar 79, dan Tahun 2023 sebesar 81, serta target pada Tahun 2024 sebesar 83.

Tabel 1. RENPROJA

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	-	51	52	53	53,51
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba		78,67	78,68	78,69	78,7
3.	Pemberdayaan Peran serta masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipas		3,40	3,40	3,40	3,40
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional		8 Lbg	5 lbg	5 Lbg	5 Lbg
			Jumlah Unit Penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
5.	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan rehabilitasi BNNK Pekanbaru		3,2	3,2	3,2	3,2
6.	Penyidikan jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21		4 Berkas	3 Berkas	5 Berkas	6 Berkas

7.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Pekanbaru		92	93	94	94
8.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Pekanbaru		94	95	96	96



Kerangka pendanaan sebagaimana tabel di atas merupakan rencana kebutuhan pendanaan program kerja BNN Kota Pekanbaru dalam Rencana Program Kerja 2020-2024 yang bersifat proyektif dan indikatif. Artinya, kebutuhan pendanaan tersebut dapat berubah atau disesuaikan dengan kondisi dinamika kebijakan alokasi penganggaran APBN dan kebijakan pimpinan Lembaga.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) Program kerja dan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

- a. Penyelenggaraan Advokasi, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) output, yaitu :
 - Fasilitasi dan pembinaan Keluarga, dengan anggaran Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa, anggaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba, kegiatan ini memiliki 1 (satu) output :
 - Pelayanan Publik kepada Masyarakat, dengan anggaran Rp. 8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat, kegiatan ini memiliki 1 (satu) output :
 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan anggaran Rp. 189.470.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Pengawasan tahanan dan barang bukti, kegiatan ini memiliki 1 (satu) output :
 - Pelayanan Publik kepada Masyarakat, dengan anggaran Rp. 15.550.000,- (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, kegiatan ini memiliki 1 (satu) output :
 - Standarisasi profesi dan SDM, dengan anggaran Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, kegiatan ini memiliki 3 (tiga) output, dengan total anggaran Rp. 153.518.000,-

(seratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), dengan rincian output :

- Pelayanan Publik kepada Masyarakat, dengan anggaran Rp. 104.588.000,-
- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan anggaran Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dengan anggaran Rp. 39.380.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

g. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, terdiri dari 1 (satu) output :

- Perkara Hukum Perseorangan, dengan anggaran Rp. 143.700.000,- (Seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

h. Pengelolaan Informasi dan Edukasi, dengan 1 (satu) output :

- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 75.347.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, dengan total anggaran Rp. 94.310.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri dari 2 (dua) output :

- Layanan dukungan manajemen Internal, dengan anggaran Rp. 89.610.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Layanan manajemen Kinerja Internal, dengan anggaran Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

b. Pengembangan Organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia, terdiri dari 1 (satu) output :

- Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan anggaran Rp. 5.940.000,-

c. Penyelenggaraan Ketatausahaan, rumah tangga dan pengelolaan Sarana dan Prasarana dengan total anggaran Rp. 1.168.412.000,- (satu

milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah, pada kegiatan ini terbagi menjadi 3 output :

- Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan anggaran Rp. 1.077.912.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal, dengan anggaran Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Layanan Manajemen Kinerja Internal, dengan anggaran Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

d. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan, kegiatan ini memiliki 1 (satu) output :

- Layanan Dukungan Manajemen Internal, dengan anggaran Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instans Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakupi outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Adapun langkah yang ditetapkan dan diperjanjikan dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dalam rangka peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ditetapkan melalui perjanjian Kinerja BNN Kota Pekanbaru sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkoba	78 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian Masyarakat	3,4 Indeks
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80,81%
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petuas penyelenggara	5 Orang

		layanan IBM yang terlatih	
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
		Jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks
8.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas Perkara
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
10.	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

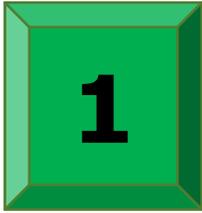
Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2023 menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 11 (sebelas) Indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) Indikator tercapai melebihi target, 3 (tiga) Indikator tercapai sesuai target dan 2 (dua) Indikator tidak tercapai, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3. Realisasi dan Capaian tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52 Indeks	53,53 Indeks	102,9%
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkoba	78 Indeks	85,625 Indeks	109,7%
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian Masyarakat	3,4 Indeks	3,85 Indeks	103,2%
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami	80,81%	73,1%	90,45%

		peningkatan kualitas hidup			
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petuas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100%
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
		Jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%
7.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	3,64 Indeks	113,75%
8.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas Perkara	7 Berkas Perkara	233,3%
9.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks	86,23 Indeks	97,98%
10.	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	98,13 Indeks	106,6%

Guna mengetahui lebih lanjut tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kota Pekanbaru selama kurun waktu Tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisa dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian baik dalam bentuk narasi maupun table dan grafik, capaian kinerja tahun 2023 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya sebagaimana ditetapkan pada perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun 2023 :



Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

a. Definisi Operasional

Definisi operasional dari Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah tingkat daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja adalah pada hasil olah data kuisisioner survey/wawancara melalui aplikasi web : <https://dektari.bnn.go.id/> atau aplikasi mobile “Dektari Aja” kepada responden yang sudah mendapatkan program pengelolaan Informasi dan Edukasi dari BNN atau pelajar/mahasiswa yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/sosialisasi di tingkat BNNK masing-masing pada tahun 2023.

c. Hasil Pengukuran

Sesuai surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Tahun 2023 di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan menggunakan aplikasi Web di dapatkan hasil sebesar **53,53** dari target **52,00** atau dengan persentase **102,9** dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 4. Capaian IKK Indeks Ketahanan Diri Remaja

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52 Indeks	53,53 Indeks	102,9%

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,4%. Penurunan tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	50 Indeks	54,87 Indeks	109,7%
2	2023	52 Indeks	53,53 Indeks	102,9%

Dapat dijelaskan tahapan-tahapan dalam pencapai target kinerja tersebut sebagai berikut :

1. Dialog Interaktif Remaja

Penjelasan kegiatan : Kegiatan yang mengundang 10 orang remaja dari 5 sekolah yang berlokasi wilayah target prioritas kelurahan bersinar kota pekanbaru yaitu 3 SMP dari kelurahan Simpang Tiga dan 2 SMP dari Kelurahan Simpang Baru

2. Informasi dan Edukasi melalui Insert Konten;

Penjelasan : BNNK Pekanbaru menerima surat dari sekolah yang bersangkutan untuk mengisi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

3. Informasi dan Edukasi melalui pemanfaatan Media Luar Ruang

Penjelasan : BNNK Pekanbaru Melaksanakan pemasangan media luar ruang (Baliho, Spanduk) dengan jumlah media luar Ruang 7 Baliho dan 2 spanduk.

Tercapainya sasaran target kinerja tersebut dapat disampaikan :

1. Penyebab Keberhasilan/ kegagalan :

- Anggaran pada kegiatan tersebut dapat digunakan sesuai dengan jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan
- Lingkungan pendidikan/sekolah mendukung pelaksanaan kegiatan dialog interaktif remaja

2. Hambatan dan kendala :

- Tempat pelaksanaan kegiatan kurang kondusif karena ruang kegiatan kurang memadai dimana jumlah peserta lebih banyak dari kapasitas ruangan dan kondisi cuaca tidak mendukung untuk pelaksanaan kegiatan di luar ruangan.

3. Rencana Aksi/ upaya yang dilakukan

- Mempersiapkan tempat yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan agar peserta lebih nyaman dalam mengikuti kegiatan.
- Akan dilakukan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba secara mandiri oleh lingkungan pendidikan atau pihak sekolah.



Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

a. Definisi Operasional

Definisi operasional Indeks Ketahanan Keluarga adalah Tingkat daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Adapun metode pengukuran IKK adalah pada hasil olah data kuisisioner survey/wawancara kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2023

b. Metode Pengukuran

Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba adalah pengukuran ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan 3 (tiga) komponen dimensi yaitu :

- 1) Sistem keyakinan (*belief system*), suatu dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- 2) Proses organisasi (*Organizational Process*) suatu struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota didalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- 3) Proses komunikasi (*communication/problem solving processes*) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi

permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Adapun klasifikasi perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai 88,31 – 100,00;
- Kategori “Tinggi” dengan nilai 76,61 – 88,30;
- Kategori “Rendah” dengan nilai 65,00 – 76,60;
- Kategori “Sangat Rendah” dengan nilai 25,00 – 64,69.

c. Hasil Pengukuran

Berdasarkan surat dari Deputi Pencegahan Nomor B/4729/XII/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 27 Desember 2023 tentang Hasil Perhitungan Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) tahun 2023 telah didapatkan hasil bahwa BNN Kota Pekanbaru mendapatkan nilai **85,625** dari target capaian **78** dengan persentase capaian realisasi sebesar **109,7** atau **kategori “Tinggi”**.

Tabel 6. Capaian IKK Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkoba

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
2.	Indeks ketahanan keluarga terhadap faktor risiko penyalahgunaan narkoba	78 Indeks	85,625 Indeks	109,7%

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 7. Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) terhadap penyalahgunaan Narkoba tahun 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	77 Indeks	90,893 Indeks	118,04%
2	2023	78 Indeks	85,625 Indeks	109,7%

Dari tabel perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2022 dan 2023, dapat disimpulkan bahwa ada penurunan pencapaian pada tahun 2023 yaitu 5,75%.

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Penyebab Keberhasilan/kegagalan:

- Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan dan tepat waktu
- Setiap keluarga berkomitmen untuk melaksanakan program P4GN dilingkungan keluarganya.

2. Hambatan / Kendala:

- Minimnya Tempat Kegiatan
- Lokasi kegiatan yang berjauhan

3. Rencana Aksi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah

- Jika setiap ada permasalahan terutama yang menyangkut kenakalan remaja dalam keluarga, pihak keluarga akan konsultasi dengan BNN Kota pekanbaru



a. Defenisi Operasional

Definisi Operasional indeks kemandirian partisipasi adalah nilai tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran IKP dari masing-masing instansi/lingkungan adalah pada hasil olah data kuesioner survey/wawancara dengan 6 (enam) indikator kepada responden yang sudah mendapatkan program penyuluhan dan intervensi dari BNN pada tahun 2023.

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dapat dijelaskan tahapan-tahapan dalam pencapaian target kinerja tersebut sebagai berikut :

- a. Pembinaan Teknis
Penjelasan : Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK Pekanbaru kepada instansi di daerah yang meliputi pemerintahan daerah instansi vertikal, Lingkungan Swasta, dan Kelompok Masyarakat
- b. Pembinaan Kelompok Sasaran
Penjelasan : Merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk memberdayakan peran serta masyarakat dimana sasaran kegiatan tersebut adalah instansi pemerintah lingkungan swasta, pendidikan ,dan masyarakat melalui kegiatan rapat kerja pemberdayaan masyarakat, rapat koordinasi pengembangan dan pembinaan Koatan dll
- c. Bimtek Penggiat P4GN
Penjelasan : Bimtek Penggiat P4GN merupakan kegiatan untuk membentuk penggiat P4GN yang memiliki motivasi dan komitmen dalam mendukung BNN dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan bersih bebas penyalahgunaan Narkoba
- d. Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat hubungan dan komitmen antara BNN dengan pemangku Kepentingan di Daerah.

c. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Indeks kemandirian partisipasi diukur dari dengan memberikan kuisisioner – kuisisioner di lingkungan swasta/perusahaan dan lingkungan pendidikan. Penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi.

Tabel 8. Capaian IKK Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,4 Indeks	3,85 Indeks	103,2%

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 terjadi peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 9. Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	3,2 Indeks	3,77 Indeks	114,2%
2	2023	3,4 Indeks	3,85 Indeks	103,2%

Dapat di lihat pada tabel pada tahun 2022 target Indeks Kemandirian Partisipasi nya sebesar 3,2 indeks dan realisasinya sebesar 3,77 indeks dengan persentase 114,2% Sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebesar 3,4 indeks dan realisasinya sebesar 3,85 indeks dengan persentase sebesar 103,2%. Dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pencapaian pada tahun 2023 sebesar 2,12%. Namun pada dasarnya dalam 2 (dua) tahun terakhir nilai pencapaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Penyebab Keberhasilan/kegagalan:

- Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan dan tepat waktu

- peserta yang diundang menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Pekanbaru

2. Hambatan / Kendala:

- Belum adanya anggaran yang sesuai untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di kota Pekanbaru
- peserta kegiatan yang hadir bukanlah pengambil keputusan atau pejabat pada instansi yang diundang.

3. Rencana Aksi kedepan :

- Pembaharuan SK Walikota Pekanbaru tentang Tim Terpadu P4GN
- Mengaktifkan partisipasi seluruh OPD Untuk berperan serta aktif dalam program P4GN di kota Pekanbaru.



Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

a. Definisi Operasional

Persentase Penyalah guna dan/ atau pecandu narkotika klien rehabilitasi rawat Jalan Klinik Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan kualitas hidup.

b. Metode Pengukuran

Evaluasi perkembangan klien adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi pada klien selama mengikuti program rehabilitasi dengan menggunakan berbagai instrument sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, salah satunya pengukuran perubahan kualitas hidup (BNN,2022).

Mekanisme pengukuran perubahan kualitas hidup penerima layanan berdasarkan 4 aspek : fisik, psikologis, hubungan social, dan sumber daya lingkungan yang diberikan pada penerimaan awal rawatan serta pada akhir layanan rajal dan/atau akhir layanan pascarehabilitasi. Pada layanan lebih dari 3 bulan, maka pengukuran dilakukan setiap triwulan. Pengukuran menggunakan istrumen WHO-QoL Bref.

Kualitas hidup didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kehidupan yang di jalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat

individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu (WHO, 1997). Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Layanan pascarehabilitasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki kapital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat produktif dan bermakna.

a. Waktu Pelaksanaan

Peningkatan kualitas hidup diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian perubahan perilaku dengan menggunakan instrument WHOQoL (World Health Organization Quality of Life) – BREF yang mengukur 4 domain kehidupan yaitu fisik, psikologis, lingkungan dan hubungan sosial. Pengisian WHOQoL-BREF dimaksudkan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kualitas hidup dari setiap klien. Pengukuran kualitas hidup yang diisi langsung oleh klien didampingi oleh petugas rehabilitasi yang telah mengikuti pelatihan. Setelah itu dilakukan penilaian kualitas hidup pada masing-masing domain. Waktu pelaksanaan pengukuran WHOQoL-BREF pada saat awal klien menerima layanan rehabilitasi dan pada akhir penerimaan layanan pascarehabilitasi.

b. Tata cara Pengukuran

Tahapan pengukuran kualitas hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF;
- 2) Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
- 3) Evaluasi Hasil WHOQoL;
- 4) Pencatatan dan dokumentasi hasil WHOQoL-BREF.

Tahapan Pengisian WHOQoL-BREF :

- 1) Kuisisioner WHOQoL-BREF dilaksanakan pada saat klien datang atau sampai dengan H+7, dengan melihat kondisi klien. Diharapkan pada saat pengisian klien dalam keadaan stabil dan nyaman.
- 2) Kuisisioner berbentuk pernyataan dan jawaban atas pernyataan tersebut.
- 3) Pengisian kuisisioner didampingi oleh petugas;

4) Petugas dilarang mengarahkan jawaban klien;

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan hasil evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan efektifitas layanan rehabilitasi berupa peningkatan skor kualitas hidup klien yang didokumentasikan dan diinput ke dalam system informasi rehabilitasi narkotika (SIRENA).

C. Hasil Pengukuran

BNN Kota Pekanbaru memiliki target persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup di tahun 2023 sebesar 80,81%. Berdasarkan surat dari Deputi Rehabilitasi Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN tanggal 15 Januari 2024 tentang Penyampaian hasil pengukuran IKM, IKR dan Prosentase Peningkatan Kulaitas Hidup Tahun Anggaran 2023, dengan hasil prosentase peningkatan kualitas hidup BNN Kota Pekanbaru sebesar 73,1%.

Tabel 10. Capaian IKK Persentase Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80,81%	73,1%	90,4%

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Penyebab Keberhasilan/kegagalan:

- Tingkat pemahaman klien dalam pengisian Instrumen WHOQoL.

2. Kendala dalam pencapaian Target :

- Tingkat pemahanan petugas dalam perhitungan formula masih kurang sehingga penerima layanan rehabilitasi kurang tepat dalam pengisian indeks penilaian.

3. Rencana Aksi kedepan :

- Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti beberapa pelatihan teknis petugas rehabilitasi;

- Melaksanakan layanan rehabilitasi sesuai standar penyelenggara layanan rehabilitasi;
- Meningkatkan upaya untuk dapat memberikan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan individual klien;
- Monitoring perubahan kualitas hidup klien.



Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

a. Definisi Operasional

Definisi operasional dari jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah Masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan teknis rehabilitasi dan bertugas menyelenggarakan operasional dan layanan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

b. Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penata laksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikatsi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

c. Hasil Pengukuran

Pada tahun 2023 BNN Kota Pekanbaru mendapatkan target Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak 5 Orang. Realisasi pada tahun 2023 sebanyak 5 Orang yang berasal dari IBM kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.

Tabel 11. Capaian IKK Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5.	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang	5 Orang	100%

Faktor Pendukung Keberhasilan :

- Koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan lokasi IBM terkait penerbitan SK dan penunjukan agen pemulihan;
- Mengikuti pelatihan bagi petugas pendamping IBM;

Rekomendasi/ rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

- Komunikasi yang aktif untuk memberikan pengetahuan lebih mengenai penyelenggaraan rehabilitasi kepada petugas layanan IBM;
- Lebih Intens mengunjungi lokasi IBM untuk memantau dan monitoring penyelenggaraan rehabilitasi.



a. Definisi Operasional

Fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat yang operasional adalah Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang ditunjuk dan diberikan peningkatan kemampuan yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi milik instansi pemerintah dan komponen masyarakat sehingga mampu melaksanakan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2023 telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, diantaranya : 1) Yayasan Sarasehan, 2) Yayasan Solid Foundation, 3) Yayasan Siklus, 4) Yayasan Satu Bumi dan 5) Geliat Pelangi

b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan adalah adanya layanan rehabilitasi yang terbentuk bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba melalui layanan rawat jalan di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (LRKM).

c. Hasil Pengukuran

Adanya lembaga rehabilitasi yang operasional dalam layanan rawat jalan dalam melaksanakan layanan rehabilitasi serta jumlah klien yang melakukan layanan rehabilitasi tersebut.

Fungsi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mendapatkan target 5 lembaga yang operasional dan tercapai 5 lembaga dengan persentase 100%.

Tabel 12. Capaian IKK Realisasi Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
6.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

Tabel 13. Perbandingan Lembaga Rehabilitasi yang Operasional 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	6 Lembaga	6 Lembaga	100%
2	2023	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

Dapat dilihat pada tabel dan grafik di atas pada tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat Perubahan target dari 6 (enam) menjadi 5 (lima) sedangkan untuk pencapaian target pada tahun 2022 dan 2023 sebanyak 100%.

Adapun beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Penyebab Keberhasilan/kegagalan:

Faktor Internal diantaranya adalah :

- a. Koordinasi antara BNN Kota Pekanbaru dan Instansi terkait yang baik dalam mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di Klinik BNN Kota Pekanbaru;

- b. Penguatan Lembaga Rehabilitasi yang dilaksanakan dengan memberikan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di Klinik Pratama BNN Kota Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi;
- c. Pembina fungsi sebagai rujukan.

Faktor Eksternal diantaranya adalah :

- a. Dukungan dari BNN, Deputi Rehabilitasi dan BNN Provinsi Riau dalam menyiapkan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi dapat dilaksanakan di Klinik Pratama;
- b. Koordinasi dengan layanan rehabilitasi Instansi Pemerintah berjalan dengan baik;

2. Hambatan / Kendala:

Tidak ada hambatan atau kendala yang dapat menghambat kelancaran kegiatan.

3. Rencana Aksi kedepan: mempertahankan keseluruhan proses penguatan layanan rehabilitasi terhadap layanan rehabilitasi milik instansi pemerintah.

Tabel 14. Capaian IKK Jumlah Unit Penyelenggara Layanan IBM yang Operasional

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
7.	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit	100%

a. Defenisi Operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. IBM melakukan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk sederhana dengan ambang batas rendah (*low threshold*), yang

berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan untuk terlibat didalamnya.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal didesa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN, untuk Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terdapat 2 (dua) kelurahan yang memiliki unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yakni di *Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru*.

b. Metode Pengukuran

Metode pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dilingkungannya dalam satu tahun anggaran.

c. Hasil pengukuran

Dalam menentukan tercapai atau tidaknya indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), dapat diukur dengan mengidentifikasi apakah layanan IBM tersebut telah beroperasi sesuai SOP yang telah ditentukan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 kondisi tersebut ada terjadi perubahan dalam jumlah target. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 15. Perbandingan Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM tahun 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	1 Unit	1 Unit	100%
2	2023	2 Unit	2 Unit	100 %

Dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2022 target jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM sebanyak 1 unit dan realisasinya sebanyak 1 unit dengan persentase 100 % dan pada tahun 2023 targetnya

sebanyak 2 unit dan realisasinya sebanyak 2 unit dengan persentase sebesar 100%.

d. Permasalahan dan hambatan

Adapun permasalahan dan hambatan yakni masih kurangnya kesadaran pecandu untuk ikut serta dalam kegiatan IBM dan juga terbatasnya dukungan anggaran dari kelurahan sehingga ketika sudah tidak dalam binaan BNN Agen Pemulihan tidak ada lagi dukungan dalam pelaksanaan kegiatannya. Kelurahan dapat menganggarkan untuk kegiatan jika ada aturan yang mengatur terkait pelaksanaan kegiatan IBM dalam mata anggaran.

e. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang adalah adanya dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru yakni dalam hal ini Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Simpang Baru dalam melaksanakan program IBM ini, serta adanya kekompakan diantara personil Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam mendukung kegiatan ini.

f. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan yang diperlukan yakni perlu adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat guna mendukung keberhasilan program IBM ini salah satunya dengan membuat regulasi terkait penggunaan anggaran di Desa untuk mendukung kegiatan P4GN. Selain itu perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pecandu narkoba.



a. Defenisi Operasional

Indeks kepuasan penerima layanan merupakan suatu cara untuk mengukur tingkat kepuasan penerima layanan terhadap layanan

rehabilitasi yang dilakukan setelah selesai menerima pelayanan dengan melihat pada 9 (sembilan) indikator : (1) persyaratan, (2) prosedur, (3) waktu pelayanan, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) maklumat pelayanan, dan (9) pelayanan pengaduan, saran dan masukan

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi guna meningkatkan kualitas layanan bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*) yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

b. Metode Pengukuran

Pengukuran indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuisisioner kepuasan layanan yang mengacu pada aturan yang berlaku yakni KepMenPan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang didalamnya ada instrumen kuisisioner kepuasan layanan.

c. Hasil Pengukuran

Hasil pengukuran Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi diukur dari dengan memberikan kuisisioner – kuisisioner survei pada masyarakat yang mendapatkan layanan di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru baik layanan konseling, pembuatan SKHPN, maupun layanan rawat jalan. Adapun penghitungan berdasarkan jawaban dan jawaban tersebut masing-masing memiliki bobot angka yang bervariasi. Pengukuran indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi di BNN Kota Pekanbaru melalui metode kuesioner dengan wawancara tatap muka, kuisisioner melalui pengisian sendiri, dan Kuisisioner elektronik (internet/e-survey).

Berikut adalah tabel pencapaian setelah dihitung jumlahnya dalam kurun waktu 1 tahun.

Tabel 16. Capaian IKK Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase%
8.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,2 Indeks	3,64 Indeks	113,75%

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 terdapat penurunan kenaikan realisasi dan persentase pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan di bawah ini :

Tabel 17. Perbandingan indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi tahun 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	3,2 Indeks	3,305 Indeks	103,3%
2	2023	3,2 indeks	3,64 indeks	113,75 %

Dapat dilihat pada tabel di atas pada tahun 2022 target indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi sebesar 3,2 indeks dan realisasinya sebesar 3,305 indeks dengan persentase 103,3 %. Sedangkan pada tahun 2023 targetnya 3,2 indeks dan pencapaian sebesar 3,64 dengan persentase sebesar 113,75%. Dengan demikian dapat disimpulkan capaian nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi pada tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 9,96%.

Adapun sasaran dalam pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan penerima layanan adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan.

d. Permasalahan/hambatan

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pada pelaksanaan metode kuisisioner elektronik (Internet/E-survey) masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara pengisiannya serta pertanyaan dalam kuisisioner terdapat item Favorable dan Unfavorable sehingga hal ini cukup riskan bagi responden salah dalam penilaian karena kurang teliti ketika membaca dan memahami maksud dari pertanyaan kuisisioner.

Dari faktor penghambat di atas, seksi rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru telah melaksanakan sosialisasi cara pengisian dan membantu dengan memandu dalam pengisiannya.

Hasil survey kepuasan penerima layanan, dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dalam penyelenggara pelayanan.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

e. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni adanya kerjasama dan kekompakan diantara para pegawai di bidang rehabilitasi selalu memberikan kuisisioner kepuasan masyarakat yang telah mendapatkan layanan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat cukup puas mendapatkan pelayanan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

f. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kedepan untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada pegawai di bidang rehabilitasi untuk selalu memberikan kuisisioner kepada masyarakat yang telah mendapatkan layanan di klinik pratama Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

8

Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

a. Defenisi Operasional

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

b. Metode Pengukuran

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit pusat dan vertikal.

c. Hasil Pengukuran

Badan Narkotika Nasional kota Pekanbaru Tahun 2023 mendapatkan target 3 berkas Perkara tindak pidana narkotika yang telah p-21 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun 2023. Dalam kurun waktu tahun 2023 hingga akhir tahun, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Tahun 2023 telah berhasil mengungkap 7 (tujuh) Berkas Perkara tindak pidana narkotika dengan hasil berkas perkara yang mana pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara.

Tabel 18. Capaian IKK Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang p-21

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas perkara	7 Berkas perkara	233,3%

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada peningkatan dalam berkas perkara yang ditangani, namun dalam persentase pencapaian terdapat hasil yang sama. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan di bawah ini :

Tabel 19. Perbandingan Jumlah berkas perkara 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	3 Berkas Perkara	4 Berkas Perkara	133,3%
2	2023	3 Berkas perkara	7 Berkas perkara	233,3%

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mendapatkan target sebesar 3 (tiga) berkas perkara dengan realisasi sebesar 4 (empat) berkas perkara atau 133,3%, sedangkan pada tahun 2023 targetnya sebanyak 3 (tiga) berkas perkara dan realisasinya sebanyak 7 (tujuh) berkas perkara dengan persentase sebesar 233,3%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian realisasi target sebanyak 4 (empat) berkas perkara atau 133,3%.

d. Permasalahan/Hambatan

Dalam pencapaian target tersebut bukannya tanpa halangan, ada beberapa kendala yang dihadapi yakni terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut, adanya pegawai fungsi pemberantasan yang merangkap pekerjaan kantor.

Kendala yang dihadapi yakni minimnya anggaran yang diberikan oleh BNN Pusat, sehingga menjadi hambatan bagi penyidik dalam pelaksanaan di lapangan, belum tercukupinya jumlah personil seksi pemberantasan, khususnya jabatan penyidik, dan minimnya sarana dan prasarana yang terkait dengan pemberantasan, baik untuk dukungan intelijen maupun akomodasi dan transportasi.

e. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang keberhasilan yakni, adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja dalam memimpin personil di seksi pemberantasan, melibatkan seluruh seksi dalam melakukan giat di lapangan, adanya kekompakan yang solid para personil di seksi pemberantasan, adanya kekompakan antara masing-masing unit kerja dalam membantu proses penindakan di lapangan, dan adanya koordinasi yang kuat antara pimpinan dengan staff dalam melaksanakan setiap kegiatan.

f. Rekomendasi

Sebagai strategi dan rekomendasi kedepannya yang dapat dilakukan bidang pemberantasan agar dapat mencapai target dengan maksimal antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dilapangan demi terungkapnya jaringan sindikat yang lebih besar, membangun komunikasi dengan sesama aparat penegak hukum dan saling tukar informasi tentang perkembangan jaringan sindikat yang menjadi target nasional maupun internasional, dan mengikutsertakan para personil pada pelatihan penyelidikan dan penyidikan serta mengevaluasi dan mengintensifkan kerja sama yang telah terjalin selama ini, Berupaya mengajukan usulan penambahan anggaran ke BNN Pusat dalam melaksanakan kegiatan P4GN khususnya di bidang pemberantasan serta menambah personil baik untuk administrasi umum, penyidik maupun pemetaan jaringan.



a. Defenisi operasionalnya

Nilai kinerja anggaran yakni capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

b. Metode pengukuran

Adapun metode pengukurannya yakni dengan mengambil nilai aspek implementasi tahun 2023 diambil dari pada Aplikasi Kementerian Keuangan yakni SMART DJA (Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu) meliputi substansi penyerapan anggaran, konsistensi atas rencana penarikan dana, capaian output dan efisiensi.

c. Hasil Pengukuran

Pengukuran nilai kinerja anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan rencana kerja anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan <https://monev.kemenkeu.go.id/> .

Tabel 20. Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran BNN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
10.	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89	86,23	97,98%

Nilai tersebut dapat diambil dari dashboard aplikasi SMART DJA yang menampilkan pencapaian kinerja anggaran BNN Kabupaten Kuantan Singingi. Aplikasi tersebut secara otomatis menghitung progress pencapaian kinerja dan persentase progres kegiatan yang sementara dilaksanakan atau telah dilaksanakan.

Kinerja Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Adapun hasil yang diperoleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 adalah 87,07 Dengan kategori “**Baik**”.



Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dan 2023 ada peningkatan dalam pencapaian. Pencapaian tersebut dapat dilihat di tabel perbandingan di bawah ini :

Tabel 21. Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran 2022-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	88 Indeks	88,67 Indeks	100,76%
2	2023	89 Indeks	86,23 Indeks	97,98%

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 targetnya sebanyak 88 indeks dan realisasinya sebanyak 88,67 indeks dengan persentase sebesar 100,76%. Dan pada tahun 2023 target 89 indeks dengan realisasi sebesar 86,23 indeks dengan persentase 97,98%. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 ada peningkatan target sebanyak 1 Indeks dan penurunan realisasi sebanyak 2,44 atau 2,75%.

d. Permasalahan/hambatan

Kendala yang dihadapi adalah ketidak-sesuaian RPD awal dengan realisasi menyebabkan deviasi pada hal III DIPA, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan anggaran berupa refocussing anggaran, kurangnya jumlah pegawai yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya, sehingga menyebabkan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatan karena harus merangkap

beberapa tugas atau pekerjaan lainnya yang menyebabkan kurang fokus terhadap pekerjaan.

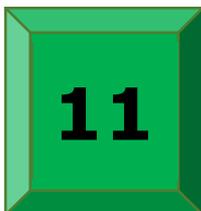
e. Faktor yang menunjang

Adapun faktor yang menunjang yakni :

- adanya kekompakan dan kerjasama dari seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatannya sesuai RPD dan timeline, evaluasi RPD dan timeline yang tidak sesuai untuk dilakukan revisi Halaman III DIPA.
- Adanya pengawasan dari Kepala BNN Kota Pekanbaru secara menyeluruh ke masing-masing unit kerja dengan melakukan rapat anev setiap minggu.

f. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dan strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikut-sertakan pegawai yang ada untuk pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, menerapkan kebijakan dinamisasi dan optimalisasi, meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kepada seluruh personil BNN Kota Pekanbaru dan menjalin komunikasi dan koordinasi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.



a. Defenisi operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran

b. Metode pengukuran

Pada TA 2023 ini, telah dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA 2023.

Reformulasi IKPA 2023 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja. Ada perubahan aspek dan indikator kinerja dalam penghitungan nilai IKPA 2023

c. Hasil Pengukuran

Adapun hasil pengukuran IKPA yakni melakukan revisi DIPA dan revisi halaman III DIPA sesuai waktunya, deviasi halaman III DIPA tidak terlalu jauh selisihnya, penyerapan anggaran yang konsisten sesuai timeline, pengelolaan UP dan TUP tepat waktu, dispensasi SPM yang tidak mengalami keterlambatan, serta capaian output yang terisi. Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu monev pelaksanaan anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada satuan kerjanya.

Tabel 22. Capaian IKK Realisasi IKPA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	98,13 Indeks	106,6%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NAKOTIBA NASIONAL KOTA PEKANBARU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Periode Pengukuran: 2023/2023

No	Kode SKPD	Kode Uraian	Kode Sub-uraian	Indikator Kinerja	Kategori	Tahap Pelaksanaan Anggaran		Realisasi Pelaksanaan Anggaran					Nilai IPM	Rencana IPM	Nilai IPM 19 dan 2019/2019/2019		
						Realisasi IPM	Realisasi IPM	Pengajuan Anggaran	Realisasi Anggaran	Pengeluaran Anggaran	Pengeluaran SP dan LUP	Dibayar SPN				Saldo Denda	
1	304	500	500000	BUDAYA DAN ORISGINALITAS	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Rendah	15	15	20	15	15	15	15	15	15			
					Nilai IPM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
					Nilai Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Gambar 3. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ada peningkatan dalam pencapaiannya. Pencapaian tersebut dapat dilihat ditabel perbandingan di bawah ini :

Tabel 23. Tabel Perbandingan Nilai IKPA tahun 2022 - 2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2021	95 Indeks	98,20 Indeks	103,4%
2	2022	92 Indeks	98,13 Indeks	106,6%

Dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2022 target nilai IKPA sebesar 95 indeks dan realisasinya sebesar 98,20 indeks dengan persentase 103,4%. Pada tahun 2023 targetnya sebanyak 92 indeks dan realisasinya sebanyak 98,13 indeks dengan persentase sebesar 106,6%. Dengan demikian dapat disimpulkan secara realisasi terjadi penurunan dari tahun 2022 hingga 2023 sebesar 0,07%, namun secara persentasi perbandingan realisasi dengan target terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,09%.

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan,

kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun strategi optimalisasi capaian IKPA :

- a. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.
- c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.
- d. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- e. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.
- f. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA
- g. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- h. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- i. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- j. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

- k. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- l. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- m. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- n. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP)
- o. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- p. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- q. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
- r. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.
- s. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- t. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir open period reguler (s.d. 5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- u. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
- v. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

d. Permasalahan/hambatan

Kendala yang dihadapi adalah Adanya beberapa aplikasi baru baik dari BNN RI dan Kementerian Keuangan yang harus dipelajari oleh tim pengelola keuangan dan sumber daya manusia yang belum memenuhi DSP. Kurangnya sarana dan prasarana pada satuan kerja, adanya kegiatan yang sering bertepatan jadwalnya di satuan kerja.

e. Faktor yang menunjang

Dikatakan berhasil karena faktor – faktor sebagai berikut : Adanya analisa dan evaluasi serta pengawasan yang menyeluruh dalam menjalankan kegiatan – kegiatan di sub bagian umum, Adanya kerjasama dengan baik antara seluruh antara pegawai, Adanya konsistensi masing – masing fungsi dalam melaksanakan tugasnya, dan Adanya komitmen yang kuat dalam mengejar target realisasi penyerapan anggaran dan time line/RPD. Dan Adanya ketepatan dalam pengisian Capaian Output serta Melaksanakan Revisi DIPA Halaman III secara tepat waktu.

f. Rekomendasi

Rekomendasi dan strategi kedepannya adalah Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan Membagi tugas secara proporsional. Untuk mencapai sasaran tersebut indikator yang harus dicapai pada tahun 2023 ini adalah Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Pekanbaru pada tahun 2023 ini BNN Kota Pekanbaru terus meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar dapat mendorong pemulihan penyalahguna narkoba di wilayah kota Pekanbaru.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA Awal sebesar Rp. 1.998.391.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), pada bulan berjalan terjadi revisi anggaran penambahan pagu dan target layanan penerbitan SKHPN PNBP dan penambahan anggaran arsiparis sehingga pagu BNNK Pekanbaru TA. 2023 menjadi Rp. 2.048.551.000,- (*Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.033.617.100,- (*Dua Milyar Tiga Puluh*

Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah), berikut Realisasi Anggaran BNNK Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 24. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Penyelenggaraan Advokasi	100.000.000	99.985.000	99,98%
2.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	189.470.000	189.370.000	99,95%
3.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	75.347.000	75.250.000	99,87%
4.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	8.190.000	8.190.000	100%
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Pemerintah	11.950.000	11.950.000	100%
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Masyarakat	153.518.000	150.751.932	98,20%
7.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	143.700.000	143.035.000	99,54%
8.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	15.550.000	15.250.000	98,07%
9.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	94.310.000	94.290.000	99,98%
10.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	51.664.000	51.664.000	100%
11.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	5.940.000	5.940.000	100%
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	1.168.412.000	1.162.441.168	99,49%
13.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	30.500.000	30.500.000	100%
Total		2.048.551.000	2.038.617.000	99,52%

Tabel 25. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

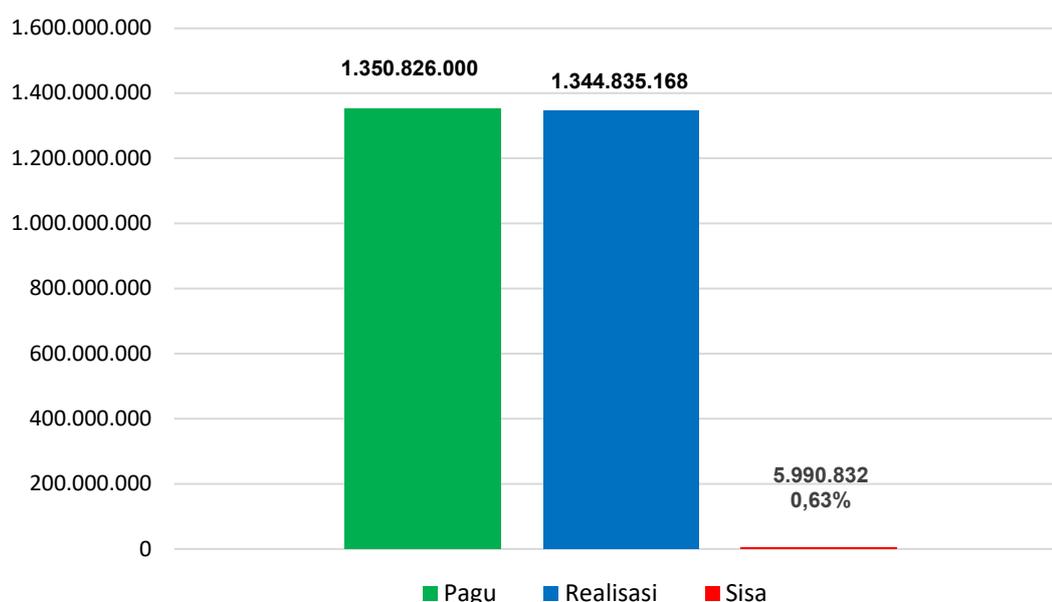
Sumber Dana	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
APBN	52 Belanja Barang	1.966.051.000	1.956.167.100	9.884.000	99,50%
	53 Belanja Modal	82.500.000	82.450.000	50.000	99,94%
TOTAL		2.048.551.000	2.038.617.000	9.934.000	99,52%

Anggaran tersebut dimaksud untuk mendukung 2 (dua) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen Pagu Anggaran Rp. 1.350.826.000,-

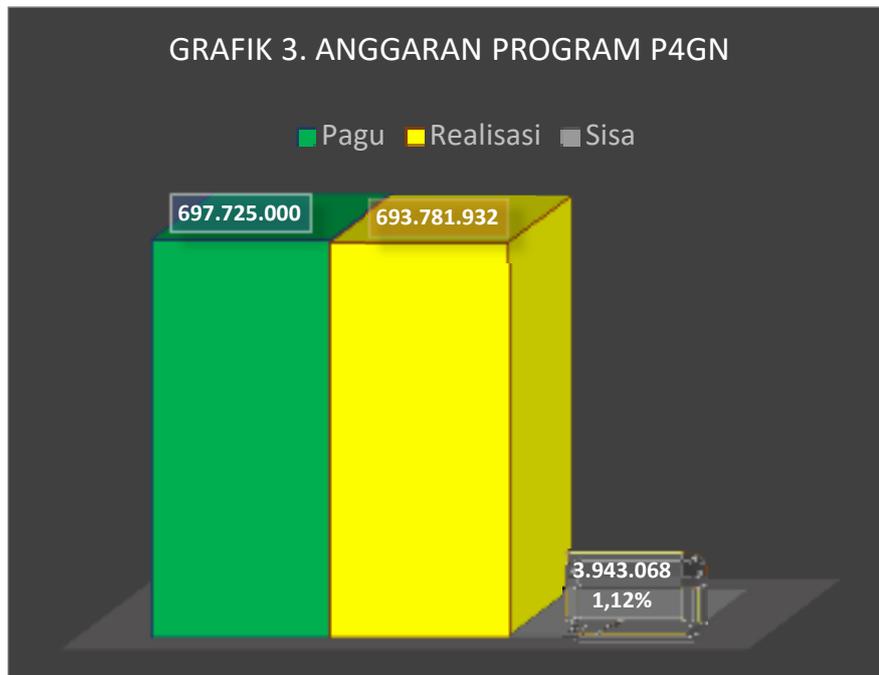
Realisasi anggaran program dukungan manajemen sebesar Rp. 1.344.835.168,- atau sebesar 99,56% sisa anggaran Rp. 5.990.832,-. Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk program dukungan manajemen disebabkan sisa pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran berupa operasional dan pemeliharaan kantor, sisa kontraktual. Sisa anggaran ini tidak mengakibatkan capaian output yang direncanakan tidak tercapai, dengan kata lain tidak mempengaruhi capaian output.

Grafik 2. Anggaran Program DUKJEMEN



2. Program P4GN Pagu Anggaran Rp. 697.725.000,-

Realisasi anggaran program P4GN sebesar Rp. 693.781.932,- atau sebesar 99,43% sisa anggaran Rp. 3.943.068,-.



Anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun 2023 tidak dapat terserap secara keseluruhan sebesar Rp. 9.934.000,- (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) karena adanya efisiensi sisa swakelola program dan rutin.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2023

No	Tahun	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	2022	1.926.631.000	1.891.704.703	99,22%
2.	2023	2.048.551.000	2.038.617.000	99,52%

Dari tabel diatas dapat diuraikan terdapat peningkatan pagu dan realisasi anggaran di BNN Kota Pekanbaru jika dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar 0,3%.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan permasalahan sehingga menjadi hambatan bagi BNN kota Pekanbaru dalam mencapai target capaian kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain :

1. Adanya *automatic adjustment*/ pemblokiran anggaran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Adanya aplikasi – aplikasi baru dari Kementerian Keuangan sehingga membutuhkan waktu bagi pegawai untuk mempelajari hal baru tersebut.
3. Belum tercukupinya jumlah personil yang sesuai dengan daftar susunan pegawai (DSP) di satuan kerja sehingga para pegawai merangkap pekerjaan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BNN kota Pekanbaru dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).
5. Belum adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program P4GN.
6. Belum adanya kesiapan aparat Desa/Kelurahan untuk merealisasikan kegiatan IBM.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan cara :

1. Merencanakan secara matang kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan yang menjadi skala prioritas nasional.
2. Selalu meningkatkan koordinasi antar stakeholder, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Perusahaan Swasta, dan Masyarakat terkait program kerja BNN kota Pekanbaru.
3. Selalu meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi (BNNP Riau) dan Eselon 1 (BNN Pusat) terkait gambaran dan konsep rencana kegiatan yang belum dipahami.
4. Mengajukan penambahan personil / Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil di BNN Kabupaten Kuantan Singingi agar seluruh kegiatan – kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Adapun rekomendasi yang dilakukan kedepan yakni :

1. Melakukan banyak terobosan kreatif di sosial media sehingga BNN Kota Pekanbaru semakin dikenal dimasyarakat luas.
2. Meningkatkan peran Hubungan Masyarakat dalam menginformasikan kegiatan BNN Kota Pekanbaru di masyarakat.

3. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat guna mendukung keberhasilan program rehabilitasi.
4. Perlunya sosialisasi tentang program rehabilitasi yang lebih luas kepada masyarakat agar tumbuh pemahaman dan kesadaran untuk lebih peduli dengan permasalahan serta betapa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahguna dan pencandu narkoba.
5. Menerapkan strategi kebijakan optimalisasi dan dinamisasi kepada para pegawai serta membagi tugas secara proporsional.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan BNN Kota Pekanbaru sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Pekanbaru telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui program P4GN sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023, pencapaian tingkat efektifitas pelaksanaan Program P4GN tersebut tidak terlepas dari peran strategi program P4GN yang menysasar dan memfokuskan pada area-area tertentu sebagai prioritas sekaligus pola pengelolaan programnya bersifat terintegritasi.

Capaian kinerja BNN Kota Pekanbaru pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan ada 11 (Sebelas) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN kota Pekanbaru. Berdasarkan indikator tersebut BNN Kota Pekanbaru umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja :

1. 6 (enam) Indikator Kinerja capaian melebihi dari target yang ditetapkan;
2. 3 (tiga) Indikator Kinerja capaian sesuai target atau 100%, dan;
3. 2 (dua) Indikator Kinerja tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA Awal sebesar Rp. 1.998.391.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), dan adanya perubahan kebijakan sehingga anggaran menjadi Rp. 2.048.551.000,- (*Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.033.617.100,- atau sebesar 99,52%.

B. Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain :

1. Perlu adanya penambahan personil yang kompeten sesuai dengan bidangnya untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/ monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muata pembinaan.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Pelaksanaan Program Rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah dipersiapkan bahan baik regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan dari awal tahun.
5. Diharapkan adanya bimbingan teknis terkait optimalisasi untuk pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNN Kota Pekanbaru tahun 2023 ini disajikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak terkait, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pada tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **BERLIANDO, S.I.K.**
Jabatan : **KEPALA BNN KOTA PEKANBARU**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ROBINSON D. P. SIREGAR., S.H., S.I.K.**
Jabatan : **KEPALA BNNP RIAU**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 04 Desember 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP RIAU

Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K., M.H

Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA PEKANBARU

Berliando, S.I.K.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	78 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,4 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	80,81 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	5 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	3,2 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	3 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	100.000.000
2. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	8.190.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.	189.470.000
4. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	15.550.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	11.950.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	153.518.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.	143.700.000
8. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	75.347.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	94.310.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	51.664.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	5.940.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	1.168.412.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	30.500.000

Pekanbaru, 04 Desember 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP RIAU



Robinson D. P. Siregar., S.H., S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA BNN KOTA PEKANBARU



Berliando, S.I.K.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

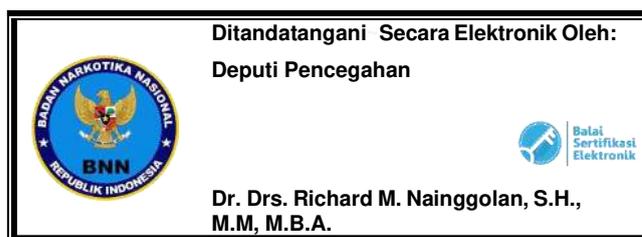
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH	52.41	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA	54.07	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT	52.52	Tinggi
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU	53.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI	49.81	Tinggi
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN	53.13	Tinggi
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG	51.28	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG	53.46	Tinggi
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU	52.97	Tinggi
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU	53.77	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI DKI	49.55	Rendah

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
JAKARTA		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN	50.46	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA	51.71	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA	51.51	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH	50.85	Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN	56.79	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA	53.60	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT	55.11	Sangat Tinggi

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU	51.34	Tinggi
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA	52.06	Tinggi
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI BALI	55.87	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT	53.64	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR	53.16	Tinggi
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO	52.57	Tinggi
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA	49.66	Rendah
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Deputi Pencegahan



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
M.M, M.B.A.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : \${nomor} Jakarta, \${tanggal}
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

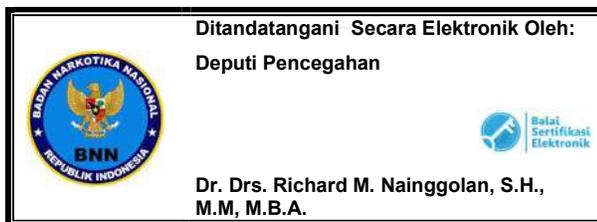
Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

\$(qrcode)



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : \${nomor}
 TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
28	BNNP SUMATERA BARAT	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
33	BNNP RIAU	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
38	BNNP JAMBI	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	82,589	TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : \${nomor}
 TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
67	BNNP BENGKULU	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : \${nomor}
TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNNP BANTEN	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : \${nomor}
 TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : \${nomor}
 TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : \${nomor}
 TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAkan	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,214	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : \${nomor}
TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
187	BNNP BALI	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	77,411	TINGGI

LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : \${nomor}
TANGGAL : \${tanggal}

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	BNNP PAPUA	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	76,696	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2023		85,389	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Deputi Pencegahan

\$(qrcode)



Dr. Drs. Richard M. Nainggolan, S.H.,
M.M, M.B.A.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	008	066	689529	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU	Nilai	100.00	81.92	99.88	100.00	100.00	99.90	100.00	99.88	98.13	100%	98.13
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.19	19.98	10.00	10.00	9.99	5.00	24.97			
					Nilai Aspek	90.96		99.96					99.88			



LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	94,310,000	94,290,000	99.98%	0	0	20,000
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	51,664,000	51,664,000	100.00%	0	0	0
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	5,940,000	5,940,000	100.00%	0	0	0
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1,168,412,000	1,162,441,168	99.49%	0	0	5,970,832
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	100,000,000	99,985,000	99.99%	0	0	15,000
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	8,190,000	8,190,000	100.00%	0	0	0
7	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	189,470,000	189,370,000	99.95%	0	0	100,000
8	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	15,550,000	15,250,000	98.07%	0	0	300,000
9	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	11,950,000	11,950,000	100.00%	0	0	0
10	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	153,518,000	150,751,932	98.20%	0	0	2,766,068
11	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	30,500,000	30,500,000	100.00%	0	0	0
12	5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	143,700,000	143,035,000	99.54%	0	0	665,000
13	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	75,347,000	75,250,000	99.87%	0	0	97,000
Jumlah		2,048,551,000	2,038,617,100	99.52%	0	0	9,933,900

Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat bruto